

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengangguran**

Pengangguran adalah dimana keadaan seseorang tidak memiliki suatu pekerjaan atau sedang mencari suatu pekerjaan secara aktif untuk mendapatkan pekerjaan (Sumarsono, 2009). Angkatan kerja terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang berusia 15-64 tahun.

Sedangkan pengangguran terbuka adalah orang yang tidak mempunyai suatu pekerjaan apapun dan sedang aktif mencari pekerjaan. Dalam pernyataan ini tidak memiliki satu jam pun bekerja yang dibayar, tidak memiliki usaha sendiri yang menghasilkan pendapatan atau ikut magang yang memberikan pendapatan. Jenis-jenis pengangguran Pengangguran berdasarkan penyebabnya:

##### **a. Pengangguran Normal atau Friksional**

Pengangguran friksional pada dasarnya disebabkan karena seseorang yang telah meninggalkan suatu pekerjaan demi mencari pekerjaan yang lebih baik sesuai yang diharapkan. Pengangguran Friksional dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Banyaknya tenaga kerja yang setiap tahun mencari pekerjaan dan para pencari kerja tersebut baru pertama kali mencari pekerjaan. Seperti, para lulusan sarjana yang telah selesai tugasnya

dikampus mereka akan segera mencari informasi lowongan pekerjaan.

- 2) Perusahaan yang ditinggalkan oleh pekerja. Kegiatan perekonomian yang tinggi kadang ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan menghadapi masalah seperti terjadinya krisis ekonomi atau pangsa pasar tidak seperti biasanya sehingga para pekerja akan meninggalkan pekerjaannya demi mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai. Selain itu para pekerja meninggalkan pekerjaan yang lama demi mendapatkan upah yang lebih besar.
- 3) Banyaknya pekerja yang memasuki pasaran buruh. Para pekerja yang telah meninggalkan pekerjaan tersebut karena suatu hal, namun nantinya mereka para pekerja akan kembali untuk bekerja lagi. Contoh : seorang wanita yang sedang bekerja mengandung anaknya yang pertamadan ia memutuskan untuk berhenti kerja. Setelah anaknya sudah berumur beberapa bulan maka ia akan mencari kerja kembali.

b. Pengangguran Siklika

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang timbul sebagai akibat menurunnya kegiatan ekonomi

c. Pengangguran Struktural

Beberapa industri dan perusahaan akan berkembang cepat ketika perekonomian mengalami pertumbuhan, namun beberapa diantaranya ada yang mengalami kemunduran yaitu kegiatan ekonomi. Sehingga pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi disebut pengangguran struktural. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran struktural antara lain :

- 1) Teknologi yang telah mengalami perkembangan. Sebelum adanya industri komputer yang sangat berkembang pesat pada saat ini ada mesin ketik yang sebelumnya telah mengembangkan sektor industri. Hal ini semakin meluasnya penggunaan komputer menyebabkan permintaan mesin ketik berkurang dan industri mengalami kemunduran. Sehingga para pekerja menjadi menganggur. Pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan teknologi ini dinamakan pengangguran teknologi.

- 2) Adanya persaingan dari luar negeri atau dari luar daerah yang menyebabkan kemunduran. Banyaknya persaingan dari luar negeri di negara-negara maju mengakibatkan mereka untuk membatasi impor barang-barang seperti barang konsumen, ekspor pakaian dan sepatu yang murah. Sehingga akan menyebabkan pengangguran structural.
- 3) Akibat adanya pertumbuhan yang pesat maka perkembangan ekonomi akan mengalami kemunduran.

Menurut para ahli ekonomi pengangguran friksional dan pengangguran struktural termasuk pengangguran yang wajar. Oleh karena itu maka dikelompokkan sebagai natural unemployment (Friedman, 1968) Pengangguran friksional dan pengangguran struktural telah berhasil diwujudkan apabila kesempatan kerja berhasil dicapai.

#### d. Pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi yang modern,

karyawan akan digantikan oleh tenaga mesin yang canggih.

Sehingga dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja.

Pengangguran berdasarkan cirinya:

a. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang berusia kerja namun tidak mempunyai pekerjaan apapun. Dalam hal ini, tidak punya satu jam pun kerja yang dibayar, tidak memiliki usaha sendiri yang menghasilkan pendapatan atau ikut magang yang memberikan pendapatan.

b. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah kegiatan dimana jenis pekerjaan ekonomi melebihi jumlah batas yang dilakukan oleh tenaga kerja. Sehingga akan banyaknya pekerjaan yang ada mengakibatkan para pekerja dalam menjalankan kerjanya tidak efektif.

c. Pengangguran bermusim

Pengangguran bermusim yaitu keadaan seseorang yang menganggur pada waktu masa-masa tertentu dalam satu tahun. Misalnya, petani mereka akan dikelompokkan sebagai penganggur bermusim karena dalam bercocok tanam mereka harus menunggu musim hujan. Sehingga ketika musim

hujan belum datang mereka untuk beberapa bulan harus menganggur.

d. Setengah menganggur

Setengah menganggur adalah keadaan pengangguran ketika seseorang bekerja jauh lebih rendah dari jam normal. Sehingga mereka akan bekerja dibawah jam normal. Pada penelitian ini fokus kajian akan lebih mengarah pada tingkat pengangguran terbuka. menurut (Sumarsono, 2009) menjelaskan bahwa pengangguran terbuka ialah mereka yang secara sukarela maupun karena terpaksa benar-benar tidak mau bekerja. Mengingat bahwa yang termasuk pengangguran terbuka adalah semua angkatan kerja yang tidak bekerja, maupun sedang mencari kerja baik sedang mencari kerja baru pertama kali ataupun mencari kerja setelah Putus Hubungan Kerja (PHK), menyebabkan tingkat pengangguran terbuka lebih baik dalam menjelaskan besaran jumlah pengangguran yang terjadi.

## 2. **Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Sasana, 2006), PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan

faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

- a. PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

b. Menurut pendekatan pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu: Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, ekspor netto, menurut pendekatan pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan



tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2000), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

### **3. Kemiskinan**

#### **a. Pengertian kemiskinan**

Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. C. Suryawati (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima

dimensi, yaitu: kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- 3) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat

kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

- 4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

b. Ukuran kemiskinan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antar wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah

pedesaan dan perkotaan (Suryawati et al., 2005). Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin (Suryawati et al., 2005). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria (Suryawati et al., 2005), yaitu:

- 1) Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian perorang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.
- 2) Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stelper tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

#### **4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas

perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

a. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging peoples's choices"*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhannya ekonominya.

Sebagaimana laporan UNDP (1990), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;

- 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata;
- 3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal;
- 4) Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan;
- 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Konsep pembangunan manusia yang diprakarsai dan ditunjang oleh UNDP ini mengembangkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan pertama sekali pada tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap

mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

- 1) Indeks Harapan Hidup
- 2) Indeks Pendidikan
- 3) Indeks standart Hidup Layak

Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)}$$

Di mana :

X1 = Indeks Harapan Hidup



X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standart Hidup Layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i : I_i = \frac{X_i - \text{Min } X_i}{\text{Max } X_i - \text{Min } X_i}$$

Di mana:

$I_i$  = Indeks komponen IPM ke  $i$  di mana  $i = 1, 2, 3$

$X_i$  = Nilai indikator komponen IPM ke  $i$

Max  $X_i$  = Nilai maksimum  $X_i$

Min  $X_i$  = Nilai minimum  $X_i$

#### 1) Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel  $e_0$  diharapkan akan

mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (*metode Brass, varian Trussel*). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

## 2) Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (RRS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang

berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

$$RRS = \frac{\sum f_i \times s_i}{\sum f_i}$$

Di mana :

RRS = Rata – rata lama sekolah

$f_i$  = Frekuensi penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan  $i$ ,  $i = 1, 2, \dots, 11$

$s_i$  = Skor masing-masing jenjang pendidikan

Setelah diperoleh nilai Lit dan RRS, dilakukan penyesuaian agar kedua nilai ini berada pada skala yang sama yaitu antara 0 dan 1 selanjutnya kedua nilai yang telah disesuaikan ini disatukan untuk mendapatkan indeks pendidikan dengan perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk RRS, sesuai ketentuan UNDP. Dengan demikian untuk menghitung indeks pendidikan digunakan rumus:

$$IP = \frac{2}{3} \text{ Indeks Lit} + \frac{1}{3} \text{ Indeks MYS}$$

Syaiful Anwar mengatakan pemberantasan buta aksara merupakan salah satu fokus penting

untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia. Berhasilnya program pemberantasan buta aksara akan membuat warga percaya diri dan berdaya untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

### 3) Indeks Standart Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM ub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP dengan tahapan sebagai berikut (berdasarkan ketentuan UNDP):

- a) Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per tahun untuk 27 komoditi dari SUSENAS Kor yang telah disesuaikan (=A).
- b) Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun yang bersangkutan.
- c) Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar daerah, diperlukan indeks "Kemahalan" wilayah yang biasa disebut dengan daya beli per unit (= PPP/ Unit). Metode penghitungannya disesuaikan dengan metode yang dipakai International Comparison Project (ICP) dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Data yang digunakan adalah data kuantum per kapita per tahun dari suatu basket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul sesuai ketentuan UNDP. Penghitungan PPP/unit dilaksanakan dengan rumus :

$$\frac{PPP}{unit} = Ri = \frac{\sum_{j=1}^{27} E(i,j)}{27 \sum P(i,j)(i,j)}$$

Di mana:

$E(i,j)$  = Pengeluaran untuk komoditi j di Provinsi i

$P(i,j)$  = Harga komoditi j di Provinsi i

$Q(i,j)$  = Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Provinsi i

## 5. **Pertumbuhan Penduduk**

### a. **Pengertian Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Dengan keadaan yang demikian di mungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif.

Ricardo, (1973) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat

hidup minimum (*subsistence level*). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandekan) yang disebut Stationary State. 48 Dengan keadaan seperti ini akan membuat pertumbuhan perekonomian disuatu wilayah akan melemah.

b. Menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan mendatang. Laju pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik adalah sebagai berikut.

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

Keterangan :

$P_t$  = jumlah penduduk pada tahun  $t$

$P_0$  = jumlah penduduk pada tahun dasar

$t$  = jangka waktu

$r$  = laju pertumbuhan penduduk

c. Dampak Pertumbuhan Penduduk

Tujuan pembangunan ekonomi di negara negara berkembang adalah untuk meningkatkan kualitas hidup

penduduknya yang diukur dengan pendapatan riil perkapita. Pendapatan riil perkapita adalah merupakan pendapatan nasional riil atau output secara keseluruhan yang dihasilkan pada suatu negara selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian kualitas hidup tidak akan dapat ditingkatkan kecuali jika output total meningkat lebih cepat dari pertumbuhan jumlah penduduk.

Dalam pembangunan ekonomi terdapat perpacuan antara perkembangan pendapatan riil dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini sangat penting kerana pertumbuhan penduduk berkaitan dengan masalah persediaan bahan makanan dan sumber sumber riil yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan akan berpengaruh terhadap kualitas penduduk itu sendiri. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah tingginya tingkat jumlah penduduk di negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi.



## **B. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu di berbagai negara.

Bakare (2011) melakukan penelitian tentang faktor penentu krisis pengangguran di perkotaan negara Nigeria yaitu PDB, pertumbuhan penduduk dan inflasi. PDB memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran sedangkan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pengangguran. Kenaikan PDB di Nigeria disebabkan oleh besarnya sektor pertanian yang bahkan menjadi salah satu industri terkuat di negara ini. Kontribusi industri pertanian terhadap PDB adalah dengan menyerap banyak tenaga kerja. Menurut data, kenaikan PDB sebesar 1% dapat mengurangi pengangguran sebesar 6,15%. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang meningkat sebesar 1% menyebabkan tingkat pengangguran juga meningkat 6,87%. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah pekerjaan. Sehingga sedikitnya penyerapan tenaga kerja mengakibatkan pengangguran yang tinggi.

Selain itu, kemiskinan juga menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran. Ayinde (2008) melakukan penelitian di negara yang sama (Nigeria) namun memfokuskan kemiskinan dan pertumbuhan pertanian sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran. Penurunan

kemiskinan yang disebabkan oleh kenaikan pertumbuhan di sektor pertanian akan mengurangi jumlah pengangguran dikemudian hari. Sesuai dengan penelitian Bakare (2011), Ayinde (2008) menyetujui bahwa pengangguran dapat diatasi dengan menjaga sektor pertanian yang merupakan sumber pendapatan (PDB) di negara Nigeria.

Dalam konteks PDB, Dell'anno (2008) memiliki pendapat yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dell'anno (2008) menyatakan bahwa PDB memiliki hubungan yang positif terhadap pengangguran di negara Amerika Serikat. Menurut hasil penelitian, PDB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kenaikan PDB sebesar 1% akan meningkatkan pengangguran sebesar 1,54%. Salah satu sumber PDB adalah pajak yang diterima dari pendapatan perusahaan di berbagai sektor. Banyak perusahaan yang menggunakan teknologi canggih yang menggantikan tenaga kerja (manusia). Walaupun perusahaan mengalami peningkatan pendapatan (pengurangan pengeluaran) yang dapat meningkatkan PDB sebuah daerah, pengangguran menjadi permasalahan serius. Seharusnya peningkatan PDB dapat mengurangi pengangguran, namun hal tersebut tidak dapat di implementasikan di Amerika Serikat.

Penelitian Malizia (1993) membahas tentang pengaruh keragaman ekonomi pada pengangguran dan stabilitas. Dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan penduduk, jumlah lapangan kerja di sektor industri dan tingkat pengangguran pada periode

1972-1988 di negara Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran. Kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 1% akan mengurangi pengangguran sebesar 1,3%. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah metropolitan disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dapat membuka banyak lapangan kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran.

Selanjutnya Alghofari (2007) meneliti tentang analisis tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 1980-2007. Penelitian ini menggunakan variable independen yaitu jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, dan PDB. Menurut hasil penelitian, inflasi merupakan satu-satunya variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Sedangkan variabel lainnya seperti jumlah penduduk, upah, dan PDB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Jumlah penduduk upah dan PDB memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan data regresi kenaikan PDB sebesar 1% akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,74% dan kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,88%. Hal tersebut di karenakan jumlah penduduk yang banyak di setiap tahunnya tidak sesuai dengan banyaknya lapangan kerja yang ada. Serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia berorientasi pada padat modal bukan padat karya. Dari

distribusi persentase PDB menurut lapangan usaha, terlihat bahwa sektor industri yang dominan dalam menyumbang pendapatan, tetapi menyebutkan upah memang naik secara nominal, tetapi kenaikan tersebut hanya mengikuti inflasi, kenyataannya kenaikan tersebut tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan kenaikan barang-barang yang terjadi di Indonesia dan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran.

Hasil penelitian lainnya dijelaskan oleh Prawoto (2013). Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu PDB dan jumlah penduduk memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 1984-2013. Kenaikan PDB sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran. kondisi ini sesuai dengan teori bahwa ketika PDB naik maka pengangguran menurun. Sedangkan kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran 0,27%. Ketika terjadi populasi maka akan ada meningkatnya persaingan setiap orang untuk lebih meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki. Dengan demikian semua orang bersaing untuk bekerja hal ini berasumsi bahwa pengangguran dan jumlah penduduk memiliki hubungan negatif dalam penelitian ini.

Penelitian lainnya, Sisnita (2016) menjelaskan mengenai pengaruh pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Penelitian ini menjelaskan variabel independen yaitu, investasi upah minimum dan indeks pembangunan manusia yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kenaikan

IPM sebesar 1% akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1,15%. Hal ini sesuai dengan teori Todaro bahwa melalui peningkatan pembangunan modal manusia dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan produktivitas manusia dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak akan mengurangi tingginya tingkat pengangguran.

Dalam konteks IPM, Nurcholis (2014) memiliki pendapat berbeda yaitu penelitian tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa PDRB dan upah minimum variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan IPM berpengaruh positif dan signifikan. Jika IPM naik sebesar 1% maka jumlah pengangguran naik sebesar 31,75%. Sedangkan kenaikan PDRB sebesar 1% mengakibatkan jumlah pengangguran akan turun sebesar 46,10%. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat, terutama bagi lulusan perguruan tinggi yang selektif dalam memilih sebuah pekerjaan. Sehingga mereka lebih baik menganggur hingga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, seperti gaji yang tinggi atau perusahaan yang bereputasi.

Selanjutnya Azizah (2016) meneliti tentang analisis pengaruh jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka dikabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2014. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen seperti PDB, jumlah penduduk dan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini mengindikasikan apabila jumlah penduduk dan PDRB meningkat maka tingkat pengangguran di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah juga akan meningkat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Jawa tengah berorientasi pada pekerjaan padat modal. Sehingga banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja manusia dan menggantikannya dengan teknologi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga PDRB meningkat. Serta jumlah penduduk yang selalu meningkat maka tingkat pengangguran juga terus meningkat. Hal ini terjadi karena pendidikan terakhir angkatan kerja yang rendah dan kenaikan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kenaikan kesempatan kerja.

Koirulana (2017), Melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pengangguran pada tahun 2011-2015. PDRB dan jumlah penduduk adalah variabel independen. PDRB berpengaruh negatif yaitu kenaikan PDRB sebesar 1% akan menurunkan pengangguran sebesar 10,63%. Hal tersebut dikarenakan dalam strategi pembangunan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah perlu ditekankan pendekatan ekonomi sektoral khususnya sektor yang mampu menyerap

banyak tenaga kerja. Seperti industri pengolahan, perdagangan, dan hotel. Sedangkan jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran. Ketika jumlah penduduk naik sebesar 1% akan menurunkan pengangguran sebesar 1,06%. Karena tidak sesuai teori sebelumnya, hal tersebut diperlukan kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran dengan di Jawa tengah. Dengan cara peningkatkan kualitas SDM pendidikan dan pelatihan bagi pengangguran. hal tersebut akan meningkatkan keterampilan dan menambah wawasan bekerja agar lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia kerja.

Penelitian lainnya, Ramdhan et, al (2017) menjelaskan bahwa analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Samarinda pada tahun 2005-2014. Dalam penelitian ini pendidikan, PDRB, dan inflasi merupakan variabel independen yang tidak memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan variabel independen yang lain seperti kemiskinan dan upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Ketika kemiskinan naik 1% maka pengangguran akan naik sebesar 25,76% dan kenaikan PDRB sebesar 1% akan menurunkan pengangguran sebesar 37,66%. Pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian di Kota Samarinda yang semakin membaik dan berkembang dari tahun ke tahun, walaupun UMK di Kota Samarinda selalu meningkat tetapi tingkat pengangguran selalu berkurang. Hal tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan di Kota Samarinda juga

menurun. Karena kegiatan perekonomian di Samarinda semakin membaik dan berkembang dari tahun ke tahun.



### C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Diduga Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka pada Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2010-2017.
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka pada Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2010-2017.
3. Diduga Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif terhadap Tingkat pengangguran terbuka pada Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2010-2017.
4. Diduga Pertumbuhan Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka pada Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2010-2017.

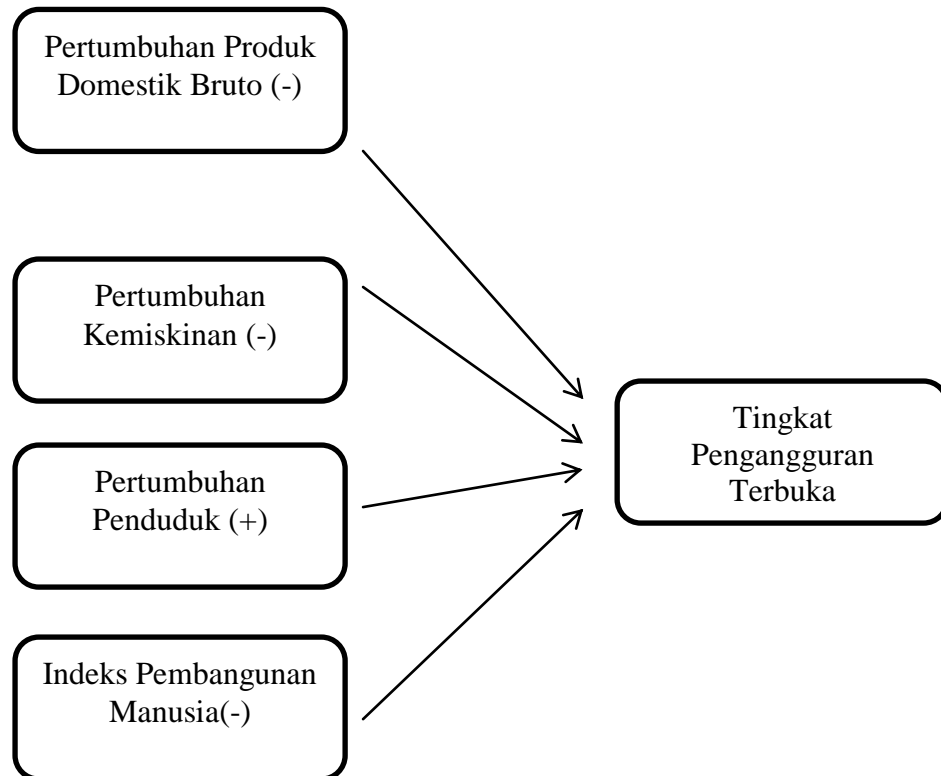
**TABEL 2. 1.**

## Penjelasan Tabel dan Hipotesa

No	Variabel	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Sign
1	TPT	Pengangguran, total (% dari total angkatan kerja)	(Ayinde, 2008), (Dell'anno, 2008), (Bakare, 2011), (Prawoto, 2013),	
2	PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku (%)	(Alghofari, 2007), (Nurcholis, 2014), (Koirulana, 2017), (Ramdhan Setyadi, dan Wijaya, 2017)	-
3	KMS	Laju pertumbuhan Jumlah penduduk miskin regional (%)	(Ayinde, 2008), (Ramdhan Setyadi, dan Wijaya, 2017)	+
4	IPM	skala indeks pembangunan manusia (0-1) (%)	(Nurcholis, 2014), (Sisnita, 2017)	-
5	PP	pertumbuhan penduduk kota pertahun (%)	(Maliza dan Ke, 1993), (Alghofari, 2007), (Prawoto, 2013), (Azizah, 2016)	+

**D. Kerangka Pemikiran Teoristis**

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara variabel independent (PDRB, IPM, Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan) dengan variabel dependen Tingkat perangguran. Seperti yang sudah dijelaskan diatas dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada lima Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdiri diatas tahun 2010, pada periode 2010-2017, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**GAMBAR 2. 1.**  
Kerangka Pemikiran Teori